

**DAMPAK KEBIJAKAN *PROACTIVE CONTRIBUTION*
TOPEACE JEPANG TERHADAP KEAMANAN
REGIONAL LAUT CHINA SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

M ALFARIDZI JAYA WIJAYA BP

E061191045

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK KEBIJAKAN *PROACTIVE CONTRIBUTION TO PEACE* JEPANG TERHADAP KEAMANAN REGIONAL LAUT CHINA SELATAN

NAMA : M. ALFARIDZI JAYA WIJAYA BP

NIM : E061191045

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 21 Agustus 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agussalim'.

Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ishaq Rahman'.

Ishaq Rahman, S.IP, M.Si
NIP. 197210282005011002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK KEBIJAKAN *PROACTIVE CONTRIBUTION TO PEACE* JEPANG TERHADAP KEAMANAN REGIONAL LAUT CHINA SELATAN

NAMA : M. ALFARIDZI JAYA WIJAYA BP

NIM : E061191045

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 15 Agustus 2023.



Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B, MA

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Alfaridzi Jaya Wijaya BP

NIM : E061191045

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul :

**“DAMPAK KEBIJAKAN *PROACTIVE CONTRIBUTION TO PEACE* JEPANG
TERHADAP KEAMANAN REGIONAL LAUT CHINA SELATAN”**

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Agustus 2023



METERAI
TEMPEL
4A D34AKX618994127

M Alfaridzi Jaya Wijaya BP

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Dampak Kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang Terhadap Keamanan Regional Laut China Selatan” dengan baik dan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi ini merupakan bentuk kontribusi penulis sesuai dengan bidang keilmuan dan memberikan informasi seputar dinamika keamanan yang ada di kawasan regional Laut China Selatan.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari segala bentuk keterbatasan penulis dan kendala-kendala yang dialami penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dengan demikian, penulis mengharapkan umpan balik berupa kritik dan saran dari para pembaca sebagai bahan masukan yang membangun agar kedepannya penulis dapat berkontribusi lebih baik dalam kepenulisan serta memberi lebih banyak manfaat kepada para pembaca.

Sebagai penutup dari kata pengantar ini, penulis berkenan menyampaikan terimakasih kepada setiap pihak-pihak yang turut berkontribusi selama proses penyusunan skripsi ini, serta selama penulis menjadi salah satu mahasiswa di jurusan Ilmu Hubungan internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin :

1. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya, penulis tidak akan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis, kepada Bapak M Bayu Ardjuna Sakti dan Ibu Wirawati dan seluruh keluarga “Puang Family” atas dukungan doa serta dukungan secara finansial selama kuliah sampai dengan proses pengerjaan skripsi ini. Tanpa adanya dukungan mereka, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
3. Terimakasih kepada Bapak Agussalim Burhanuddin, S.IP, MIRAP selaku pembimbing I dan Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si selaku pembimbing II serta dewan penguji sidang proposal maupun hasil penulis, Kak Atika Marzaman, S.IP, MA, Kak Aswin Burhanuddin, S.IP, MA, Ibu Seniwati, S. Sos, M.Hum, Ph.D, Bapak Dr. H. Adi Suryadi B, MA, Kak Nurjannah Abdullah, S.IP, MA, dan Bapak Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D. Terimakasih telah memberikan ajaran dan insight baru selama proses bimbingan sampai sidang hasil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa peran bapak dan ibu sekalian penulis tidak mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan maksimal.
4. Keluarga besar Ilmu Hubungan Internasional yang sangat Penulis banggakan, Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional terkhusus Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D, Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Bapak (alm) Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak

Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si., Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA dan Ibu Atika Terima kasih atas ilmu, bimbingan dan arahan serta motivasi selama penulis berjibaku di departemen ini. Semoga kelak penulis mampu membalas jasa baik Bapak/Ibu sekalian.

5. Kepala Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Phil Sukri, Ph.D., beserta jajarannya Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si., dan Wakil Dekan Bidang Alumni dan Kemitraan Bapak Dr. Hasrullah, M.Si.
6. Staff departemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah sangat membantu dalam proses administrasi selama berkuliah di kampus UNHAS.
7. Terimakasih kepada “Komunitas Meja Kotak”, Rahmat, Fiki, Sahrul, Farhan, Franes, atas dukungan moral, dan diskusi tembus paginya, maupun kopi hangat yang selalu menemani dikala senang dan sedih, serta *lose streak* yang dialami ditiap malamnya. Tanpa kehadiran mereka skripsi ini tidak dapat dikerjakan secara maksimal.
8. Terimakasih kepada “Komunitas Joker”, Ari, Iccang, Paje, Agung, Heru, Rindi, Arpa, Aidil, Elvis, atas dukungan yang sangat amat

minim tapi tetap menjadi suatu pertimbangan dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Terimakasih kepada seluruh pemuda-pemudi “Serigala Malam”, Mufly, Akbar, Saldi, Uta, Hadi, Nanda, Uga, Niksi, Raesha, atas segala bentuk diskusi-diskusi Tengah malam yang dilewati tanpa mengenal kata lelah, serta cacian kasih sayang yang beberapa kali kerap terucap. Kalian semua hebat !
10. Terimakasih pada teman-teman “Posyandu”-ku, Suci, Kia, Hein, karena hadir sebagai keluarga baru bagi penulis. Penulis sangat berterimakasih karena masih tetap menjalin hubungan pertemanan ini selama proses pengerjaan skripsi sampai detik ini.
11. Terimakasih teman-teman “HISTORIA”, Chanas, Olaf, Abdi, Alif, Riswan, Salsa, Mega, Daffa, Dipa, Ivan, Dzakwan, Yusril,
12. Terimakasih kepada keluarga “LINGKARAN SETAN”, Fika, Titah, Angel, Giska, Widya, Fausan, Fira, Andini, Safira, karena sudah menemani sejak masa SMA sampai saat ini. Kalian menjadi sosok keluarga baru bagi penulis, sehingga menjadi ponopang penulis dalam mengembangkan ide-ide selama proses pengerjaan skripsi ini.

ABSTRAKSI

M. ALFARIDZI JAYA WIJAYA BP, E061191045. “Dampak Kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang Terhadap Keamanan Regional Laut China Selatan”. Di bawah bimbingan Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP selaku Pembimbing I dan Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui tentang bagaimana dampak dari kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang terhadap keamanan regional Laut China Selatan. Penelitian ini menggunakan konsep *National Security Policy* oleh Christopher Schoemaker dan *Regional Security Complex* oleh Barry Buzan dalam menganalisis implementasi dan dampak dari kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang terhadap keamanan regional Laut China Selatan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif yang ditulis secara deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *Library Research*, dari situ penulis akan melihat bahkan mengkaji beberapa sumber atau literatur yang ada. Data yang ditulis dalam penelitian ini didapatkan melalui jurnal, buku, artikel, majalah, *website*, ataupun media lainnya.

Penelitian ini menemukan bahwa, implementasi dari kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang membawa dampak yang cukup signifikan terhadap keamanan yang ada di kawasan regional Laut China Selatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan kapabilitas militer Jepang dan penguatan kerja sama dengan negara-negara yang ada di kawasan Laut China Selatan dalam mengamankan kawasan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Keamanan, Keamanan Regional, Laut China Selatan

ABSTRACTION

M. ALFARIDZI JAYA WIJAYA BP, E061191045. "The Impact of Japan's Proactive Contribution to Peace Policy on Regional Security of the South China Sea". Under the guidance of Mr. Agussalim, S.IP, MIRAP as Advisor I and Mr. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si as Advisor II, in the Department of International Relations. Faculty of Social Science and Political Science. Hasanuddin University.

This study aims to find out about the impact of the Proactive Contribution to Peace Japan policy on the regional security of the South China Sea. This study uses the concept of National Security Policy by Christopher Schoemaker and Regional Security Complex by Barry Buzan in analyzing the implementation and impact of Japan's Proactive Contribution to Peace policy on regional security in the South China Sea. The research method used by the author in this research is a type of qualitative research which is written descriptively. The data collection technique used in this research is library research or library research. The data written in this study were obtained through journals, books, articles, magazines, websites, or other media.

This research found that the implementation of Japan's Proactive Contribution to Peace policy had a significant impact on security in the South China Sea regional area. This was marked by an increase in Japan's military capability and strengthening cooperation with countries in the South China Sea region in securing the area.

Keywords : Security Policy, Regional Security, South China Sea

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konsep	11
1. <i>National Security Policy</i>	12
2. <i>Regional Security Complex</i>	14
E. Metode Penelitian	18
1. Tipe Penelitian	18
2. Jenis Data.....	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Analisis Data.....	19
5. Metode Penulisan	19
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. <i>National Security Policy</i>	22
B. <i>Regional Security Complex</i>	24
C. Definisi Konseptual	28
1. <i>Boundary</i>	28
2. <i>Structure Anarchy</i>	31
3. <i>Social Construction</i>	32
4. <i>Power Distribution</i>	34
BAB III GAMBARAN UMUM	36
A. <i>National Security Strategy</i> oleh <i>National Security Council</i>	36
B. <i>National Defense Program Guidelines (NDPG)</i>	37
C. <i>Proactive Contribution to Peace</i>	40
D. Keamanan Regional Laut China Selatan	44
BAB IV	49
DAMPAK KEBIJAKAN “<i>PROACTIVE CONTRIBUTION TO PEACE</i>” JEPANG TERHADAP KEAMANAN REGIONAL LAUT CHINA SELATAN	49
A. Implementasi Kebijakan “<i>Proactive Contribution to Peace</i>” Jepang Terhadap Keamanan Regional Laut China Selatan	50

1. <i>Japan's Perception Of Its Country's Position In The International World</i>	59
2. <i>Perception About Threats</i>	63
3. <i>Security Strategy (change and continity)</i>	68
B. Dampak Kebijakan “Proactive Contribution to Peace” Jepang Terhadap Kamanan Regional Laut China Selatan	74
1. Dampak Kebijakan <i>Proactive Contribution to Peace</i> Jepang Terhadap Keamanan Regional Laut China Selatan (Japan's Point of View)	77
2. Dampak Kebijakan <i>Proactive Contribution to Peace</i> Jepang Terhadap Keamanan Regional Laut China Selatan (China's Point of View).....	89
BAB V PENUTUP	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara pasifis dan cinta damai, Jepang tentunya masih terus meningkatkan dan memperbarui kebijakan-kebijakannya dalam merespon isu-isu serta ancaman-ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara Jepang di era globalisasi saat ini, baik di level nasional, regional, serta level ancaman tingkat global. Dengan adanya rentetan isu di kawasan regional Laut China Selatan yang di inisiasi oleh China melalui aksi provokasi di wilayah sengketa serta manuver yang dilakukan oleh China, pada akhirnya Jepang mulai merespon hal tersebut dengan mengeluarkan serta memperbarui kebijakan pertahanannya dan masih memegang teguh symbol negaranya yang pasifis dan cinta damai.

Dalam merespon aksi China dikawasan regional Laut China Selatan, Jepang mulai menunjukkan upaya seriusnya dalam melakukan peningkatan kekuatan militernya, melalui dokumen National Defense Program Guidelines (NDPG) tahun anggaran 2014 (Berkofsky, 2012). NDPG merupakan panduan dasar bagi pasukan pertahanan Jepang yang juga menetapkan makna dan peran kekuatan pertahanan Jepang. Dokumen ini telah ada sejak tahun 1976 dan selalu mengalami perubahan sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi keamanan regional dan global (Defense of Japan, 2011). Dalam proses

perumusan *National Defense Program Guidelines* (NDPG) 2014 yang dimulai sejak Januari tahun 2013 sesaat setelah Kementerian Pertahanan secara resmi mengumumkan untuk melakukan revisi terhadap NDPG 2011 yang dikeluarkan pada tahun 2010 (Kementrian pertahanan Jepang, 2013). Sejak itulah Kementerian Pertahanan Jepang berusaha untuk merumuskan draft NDPG 2014 untuk diajukan kepada badan legislatif Jepang.

Dalam rancangan *National Defense Program Guidelines* (NDPG) 2014 memiliki inti kebijakan pertahanan dan keamanan yang disebut dengan “Proactive Contribution to Peace”. Dalam kebijakan pertahanan dan keamanan ini, Jepang berupaya untuk meningkatkan kapabilitas militernya dengan tujuan sebagai upaya *deterrence* agar dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman, serta untuk meningkatkan peranan dan kontribusi Jepang dalam menjaga perdamaian di level regional dan internasional (National security strategy, 2013). Tujuan tersebut merupakan strategi lanjutan dari NDPG tahun 2011 yang memiliki tujuan untuk dapat mencegah berbagai ancaman bagi keamanan nasional Jepang, termasuk juga untuk mencanangkan tindakan *deterrence* yang efektif (NDPG, 2010).

Pada tahun 2011, NDPG memang telah dicanangkan tujuan untuk melakukan tindakan *deterrence* (pencegahan) yang efektif, tetapi pada NDPG 2014 kembali dicantumkan tujuan peningkatan kapabilitas *deterrence*. Secara implisit hal ini menunjukkan bahwa

peningkatan kapabilitas militer dan bagaimana bentuk “*deterrence*” dari Jepang sejak tahun 2011 tersebut masih dirasa tidak cukup oleh Jepang, sehingga Jepang ingin meningkatkan kembali kapabilitas *deterrence* tersebut melalui dimasukkannya kembali pada NDPG 2014. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kekuatan militer Jepang telah beranjak dari yang awalnya hanya untuk mencegah masuknya hal-hal yang mengancam keamanan nasional, kemudian ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu sebuah tindakan *deterrence* jika dibandingkan dengan *role of defense capabilities* Jepang pada NDPG sebelumnya.

Namun jika dilihat dari kedekatan hubungan Jepang dan Amerika Serikat, NDPG 2014 dan kebijakan “Proactive Contribution to Peace” merupakan salah satu langkah besar yang telah diambil oleh Jepang, mengingat bagaimana upaya pertahanan yang dilakukan Jepang selama ini. Jepang selama ini memanfaatkan kehadiran pasukan militer AS yang menjadi penjamin keamanan negerinya dan sebuah kekuatan *deterrence* dalam upaya menghadapi dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik (Defense of Japan, 2012). Kehadiran pasukan militer AS di Jepang pun dapat dikatakan memiliki peran yang cukup signifikan dalam perannya sebagai penjamin keamanan Jepang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pangkalan militer AS di Jepang, seperti di Okinawa, Yososuka dan Miden (Reiji, 2008). Kehadiran pasukan AS di Jepang diterima

pemerintah dan publik Jepang dalam bentuk kerja sama militer dan pembangunan berbagai pangkalan militer AS di Jepang sebagai bentuk perlindungan AS terhadap Jepang dan peningkatan keberadaan militer AS di wilayah Pasifik. Walaupun dalam perkembangan terbaru pada tahun 2013, sejumlah tentara AS telah ditarik dari Okinawa dan dipindahkan ke Guam, tetapi sebagian pasukan militer AS masih ditempatkan di Jepang sebagai tanda kehadiran militer AS di Jepang (Defense of Japan, 2013).

Penarikan pasukan AS dari Okinawa bukan berarti AS tidak lagi melindungi Jepang sebagai aliansinya, karena pemindahan pasukan tersebut ke Guam tidak berdampak signifikan terhadap perlindungan bagi Jepang mengingat jarak antara Guam dengan Okinawa berkisar 2000-an km. Jarak ini membuat Guam sebenarnya terhitung masih cukup dekat dengan Jepang, Semenanjung Korea dan China, sehingga AS masih bisa memberikan perlindungan bagi Jepang jika dibutuhkan (Kamiya, 2014). Dengan kuatnya pengaruh dan kehadiran kekuatan militer AS di Asia Pasifik terutama di Jepang, seharusnya Jepang tidak perlu melakukan penambahan dan peningkatan kekuatan militer angkatan bersenjataanya, karena Jepang sendiri masih berada di bawah payung perlindungan AS.

Penambahan dan peningkatan kekuatan militer Jepang juga terbilang problematic, karena hal ini merupakan isu yang sensitif dengan Konstitusi Pacifists Jepang yang telah digunakan sejak era pasca PD II.

Paska kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Jepang mengalami sebuah perubahan mendasar dalam konstitusi Jepang yang disusun pada tahun 1947 dengan munculnya konstitusi paska perang yang kemudian disebut sebagai Konstitusi Pasifist. Di dalamnya terdapat sebuah klausul, pasal 9, yang membatasi kapabilitas militer Jepang dengan memaksa Jepang untuk menanggalkan haknya untuk menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan pertentangan internasional, dan haknya sebagai belligerent dalam sebuah konflik (The Constitution of Japan, 1947). Konstitusi tersebut terutama pasal 9; secara efektif mengakhiri sepak terjang pasukan militer Jepang karena pada dasarnya menghilangkan hak Jepang untuk menggunakan kekuatan militer yang merupakan salah satu pilar kedaulatan negara. Konstitusi ini juga membuat Jepang yang telah dianggap sebagai sebuah negara yang berbeda (Fetton, 2013).

Keterbatasan hak Jepang untuk menggunakan kekuatan militernya bukan berarti Jepang tidak membangun sistem pertahanan. Momentum berkecamuknya Perang Korea pada tahun 1954, membuat dibentuknya JSDF (Japan's Self – Defense Force) yang merupakan sebuah pasukan militer yang memiliki tugas untuk mempertahankan wilayah Jepang (Defense Chronology, 2011). Hal yang cukup unik dari pembentukan JSDF adalah JSDF dibentuk tanpa terlebih dahulu membentuk Kementerian Pertahanan. Baru pada tahun 2007, saat masa pemerintahan Shinzo Abe, terbentuklah Kementerian Pertahanan

Jepang (Ministry of Defense) (Kementrian Pertahanan Jepang, 2013).

Di tahun-tahun setelah JSDF terbentuk, JSDF terus mendapatkan peran yang lebih aktif lagi di dalam menjamin pertahanan serta keamanan negara Jepang tidak hanya di level kawasan Asia Timur atau bahkan hingga global. JSDF terlibat dalam berbagai operasi multilateral yang dipimpin oleh UN seperti operasi penjagaan perdamaian dan berbagai operasi militer lain sebagai pasukan pendukung setelah disahkannya International Peace Cooperation Law yang memberikan Jepang dan JSDF sebuah legitimasi untuk terjun dalam berbagai operasi militer internasional (Defense of Japan, 2011). Hal ini dapat diartikan sebuah upaya awal mengembalikan hak Jepang untuk mengirimkan pasukannya ke wilayah di luar negaranya untuk pertama kalinya pasca perang dunia kedua walaupun Jepang menganut Konstitusi Pasifis.

Pada tanggal 30 Mei 2013 lalu, partai yang berkuasa di Jepang, yaitu LDP (*Liberal Democratic Party*) menginisiasi program peningkatan kekuatan militer terkait JSDF (Sudakov, 2013). Program ini ditujukan untuk merestrukturisasi JSDF untuk tidak hanya menjadi pasukan pertahanan nasional sesungguhnya, sebuah lembaga militer negara yang memiliki segala jenis kapabilitas militer yang dibutuhkan untuk mempertahankan negaranya tetapi juga untuk hal-hal di luar pertahanan. Program ini dapat dikatakan merupakan sebuah langkah yang besar mengingat adanya keterbatasan untuk mengembangkan

kapabilitas militer Jepang sebagai konsekuensi dari pasal 9 dari konstitusi Jepang sendiri.

Berdasarkan keputusan kabinet Jepang pada 17 Desember 2013, pemerintah Jepang menetapkan dua dokumen utama yakni; Strategi Keamanan Nasional pertama Jepang, untuk menetapkan arah dasar kebijakan diplomatik dan pertahanan, dan versi baru Pedoman Program Pertahanan Nasional (Japangov, 2014). Lingkungan keamanan di sekitar Jepang menjadi semakin parah. Selain senjata pemusnah massal dan rudal balistik, Jepang menghadapi ancaman baru yang semakin meningkat seperti serangan cyber, dan akan menjadi sulit jika satu negara dalam mempertahankan perdamaian dan keamanannya sendiri.

Jepang akan sulit untuk melindungi perdamaian dan keamanannya sehari-hari kecuali Jepang secara aktif berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan regional serta global dan bekerja sama dengan organisasi internasional. Atas dasar pandangan tersebut, pemerintah Jepang pada akhirnya mengadopsi suatu konsep yang dikenal dengan “Proactive Contribution to Peace” sebagai prinsip dasar strategi keamanan nasional Jepang.

Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut di semua sisinya, Jepang tetap berupaya mempertahankan dan mengembangkan tatanan maritim yang terbuka dan stabil. Dan sebagai kekuatan ekonomi, sebuah negara dengan kekuatan ekonomi yang besar dan kemampuan

teknologi yang tinggi, ia bermaksud untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi dunia sambil mengamankan pertumbuhan dan kemakmuran ekonominya sendiri melalui perluasan sistem ekonomi internasional berbasis aturan yang terbuka.

Jepang akan menangani isu- isu dalam lingkup global, serta bekerja sama dengan Amerika Serikat dan mitra lainnya yang ada di kawasan Asia-Pasifik serta menjalin hubungan dalam menanamkan nilai-nilai universal seperti demokrasi, kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Selain itu, Jepang juga akan memperkuat pondasi domestic negaranya sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut. Bisa dikatakan, hal ini tidak akan mengubah kepatuhannya terhadap kebijakan yang merupakan bukti dari jalan yang telah diambilnya sebagai negara yang cinta damai.

Melalui kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintahan Jepang ini, Jepang lebih fokus dalam meningkatkan peran militer sebagai upaya pencegahan sebagai bentuk mempertahankan diri dari berbagai ancaman yang ada (baik internal maupun eksternal) serta berpartisipasi dengan aktif untuk menjaga perdamaian internasional. Kebijakan *Proactive Contribution to Peace* lahir sebagai dasar atau landasan kebijakan Jepang dalam setiap perumusan kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang yang bertujuan untuk mewujudkan upayanya sebagai bentuk kontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dalam lingkup regional dan internasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, kebijakan peningkatan kekuatan militer Jepang untuk tahun 2014 yang signifikan terlebih dengan munculnya kebijakan “*Proactive Contribution to Peace*”, dengan demikian, hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi dan dampak dari kebijakan ini. Karena perubahan kebijakan ini dapat berpotensi untuk membuat perubahan dinamika politik dan keamanan di tingkat regional, khususnya kawasan regional laut Cina Selatan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus untuk melihat bagaimana implementasi dan dampak dari kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang terhadap keamanan regional Laut China Selatan dalam rentang waktu 2014-2022, hal ini dimulai saat Jepang mulai menerapkan konsep kebijakan *Proactive Contribution to Peace* dalam setiap kebijakan pertahanan Jepang. Dengan adanya interval waktu delapan tahun ini, maka dari itu Peneliti akan melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan *Proactive Contribution to Peace* yang ada di kawasan regional Laut Cina Selatan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana implementasi kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang terhadap keamanan regional Laut China Selatan ?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan *Proactive Contribution to*

Peace Jepang terhadap keamanan regional Laut China Selatan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

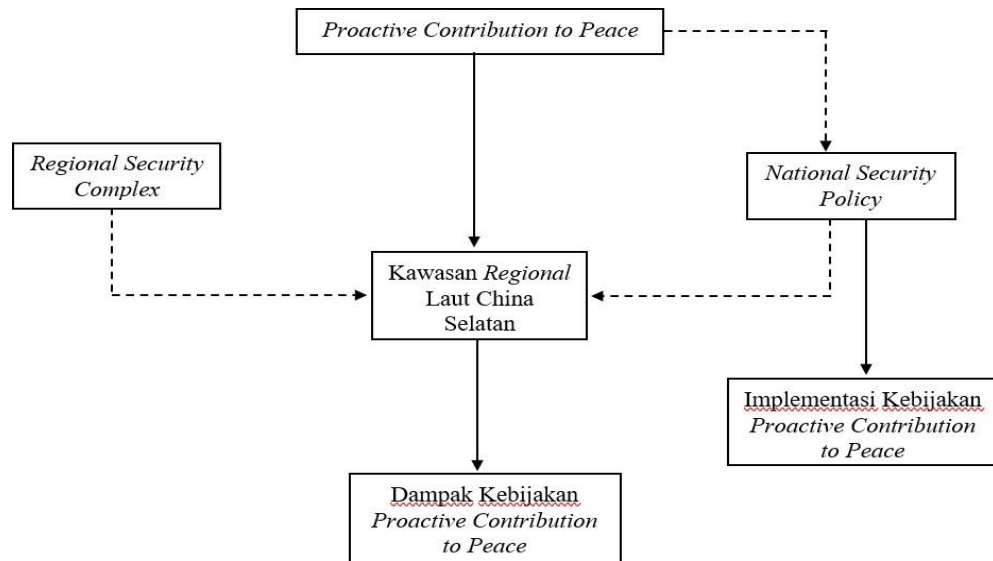
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengimplementasian dari kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang terhadap keamanan regional Laut China Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang terhadap keamanan regional Laut China selatan.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai kebijakan *Proactive Contribution To Peace* dan dinamika *regional security* dalam isu keamanan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa khususnya Ilmu Hubungan Internasional yang ingin mengkaji kebijakan keamanan dalam isu keamanan regional, lebih spesifik *Proactive Contribution to Peace*.

D. Kerangka Konsep



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Sumber: diolah oleh penulis

Dari bagan di atas, penulis menggunakan kerangka berpikir untuk memudahkan penulis dalam menganalisis penelitian yang berjudul “Dampak Kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang Terhadap Keamanan Regional Laut China Selatan”. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep *national security policy*, dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan Jepang yaitu *Proactive Contribution To peace* dan *regional security complex*, dalam hal ini untuk melihat bagaimana keadaan atau perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di kawasan regional Laut China Selatan.

1. *National Security Policy*

Barry Buzan sebagai pakar ahli keamanan telah mengemukakan sektor-sektor keamanan menjadi lima bagian, yakni; politik, militer, lingkungan, serta ekonomi dan sosial. Pendekatan-pendekatan militer yang dimaksud Buzan adalah keamanan nasional (Buzan, 1991). Peranan militer ini akan berfokus pada kapabilitas lembaga pertahanan, asesmen ancaman dan lain-lain.

Memahami dinamika ancaman dan interaksi faktor keamanan membutuhkan hubungan sosial budaya dan agama. Khususnya dalam masyarakat yang terpecah secara demografis dan etnis, budaya kekerasan seringkali menunjukkan tipologi konflik laten karena sudah mengakar. Keamanan tidak dapat dipahami dalam arti sempit, tetapi hanya dari sudut pandang negara (keamanan negara), selama keamanan muncul ketika orang sehat (*belly full*). Tindakan aparat keamanan sendiri dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan individu atau warga negara. Masyarakat tidak dihimbau untuk waspada terhadap kapan, dan bagaimana serta ancaman keamanan yang terjadi seperti apa. Masalah keamanan muncul setelah *state violence* atau kekerasan negara terhadap masyarakat terjadi.

Sistem pertahanan dan keamanan harus dirancang untuk menjamin kelestarian dan penguatan negara bangsa terhadap ancaman “eksternal” dan “domestik”. Hal yang harus diperhatikan dalam melihat system pertahanan dan keamanan juga tidak lepas dari

bagaimana pentingnya pemikiran tentang “perangkat lunak”, terutama ideologi nasional dan sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang terpenting bagi “aparatus” adalah lembaga-lembaga fungsional yang merupakan sumber daya nasional, seperti aparatur negara, masyarakat politik, dan partai. Masyarakat komersial dan masyarakat sipil (*civil society*) juga dibutuhkan. Dimensi lain yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional adalah ketahanan pangan (*food security*) dan energi (*energy security*) (Magenda, 2008).

Dinamika yang terjadi dalam permasalahan keamanan seperti itu, telah mengubah konsep keamanan nasional dari *state center security* kepada *people centered security*. Maka dari itu, sektor keamanan telah berubah menjadi keamanan yang komprehensif dan manajemen keamanan membutuhkan kerja sama antar aktor-aktor lain dan lembaga keamanan. Kemudian konteks keamanan nasional inilah yang dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Persepsi ini juga mendukung argumentasi bahwa keamanan nasional (*National Security*) didalam suatu Negara demokrasi seperti Jepang, umumnya mencakup keamanan Negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia (*state security, public security dan human security*) (Darmono, 2010).

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa keamanan menurut Buzan telah menjadi sangat jelas, dimana terdapat keterkaitan antara tujuan politik serta norma-norma dalam mendefinisikan keamanan sebagai sebuah konsep. Sektor keamanan akan selalu menjadi konsep yang “memiliki garis penghubung” serta berkaitan dengan referent object secara khusus, lokasi eksternal ataupun internal, juga kepada satu atau beberapa sektor yang khususnya berkaitan dengan cara pandang dalam politik. Hal ini bisa kita lihat dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang tentu tidak terlepas dari peranan aktor politik maupun norma (*norms*) yang ada di Jepang.

2. Regional Security Complex

Menurut Barry Buzan, Regional Security Complex adalah suatu teori keamanan regional yang memungkinkan suatu negara menganalisa dan menjelaskan perkembangan negara-negara yang berada di satu kawasan. Konsep Regional Security Complex ini muncul sebagai salah satu konsep baru dalam struktur keamanan dunia internasional sebagai dimensi yang menghubungkan pola-pola kehidupan antar negara di kehidupan internasional pada saat sebelum dan sesudah perang dingin, maupun saat perang dingin berlangsung. Regional Security Complex juga memberikan pandangan baru dan berbeda serta beragam namun memiliki pengaruh yang cukup teoritis (Buzan and Weaver, 2003).

Dalam melihat konsep Regional Security Complex, sebagai permasalahan yang menyangkut keamanan negara yang memiliki hubungan erat sehingga permasalahan mengenai keamanan nasional tidak mungkin ada tanpa memperhitungkan mengenai keamanan wilayah, walaupun terdapat ketergantungan antar negara di suatu kawasan bukan berarti keadaan yang harmonis akan tercapai bahkan hubungan antar negara dalam suatu kawasan selalu dipengaruhi oleh berbagai macam hal seperti: perimbangan kekuatan, aliansi dengan negara lain serta masuknya suatu kekuatan eksternal di dalam kawasan tersebut (Buzan and Weaver, 2003).

Regional Security Complex Theory (RSCT) dapat diartikan sebagai keadaan suatu negara dalam mengusahakan terciptanya suatu keteraturan dalam keamanan kawasan dengan cara melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangganya di kawasan tersebut. Barry Buzan dan Ole Waever merumuskan dua variable penyusun essential dalam teori Regional Security Complex yakni: (Buzan and Weaver, 2003)

1. Variabel internal, variabel ini meliputi beberapa indikator, yakni:

a) Letak geografis

Dalam letak geografis yang menjadi fokus adalah dengan melihat seberapa besar peranan letak geografis dalam mendefinisikan suatu negara sebagai suatu kawasan. Karena tidak semua negara yang letaknya berdekatan itu dapat menjalin suatu pengaturan keamanan

bersama.

b) Interaksi antar negara

Sedangkan interaksi antar negara ini akan melihat seberapa sering dan seberapa dekat hubungan (interaksi) antar negara-negara dalam suatu kawasan. Kemudian dengan berfokus dalam melihat apakah interaksi yang terjadi antar negara begitu dalam sehingga mereka merasakan hal yang sama dalam artian satu kesatuan. Namun, bisa jadi sebaliknya dimana interaksi yang terlalu sedikit itu dapat membuat persepsi baru bahwa mereka tidak mengenal negara tetangganya sendiri.

c) Kesamaan sistem

Kesamaan sistem ini dapat dilihat dari berbagai kesamaan sistem lainnya mulai dari budaya, ekonomi, sosial dan politik dalam negara-negara yang ada di satu kawasan. Semakin banyak negara-negara tersebut memiliki kesamaan maka akan semakin kompleks juga, tentunya tersebut akan dapat menumbuhkan rasa solidaritas yang semakin kuat pula.

2. Variabel eksternal, dalam variabel ini dapat dilihat menggunakan dua indikator, yakni:

a) Situasi internasional

Dalam konteks dunia internasional, hal ini dapat dilihat dari bagaimana kondisi ataupun keadaan yang terjadi dalam lingkungan internasional. Apakah keadaan lingkungan internasional saat itu

mendukung atau tidaknya untuk terbentuknya pengaturan keamanan (security arrangement) dalam Regional Security Complex (RSC). Pada saat kondisi dunia dikuasai oleh kekuatan Amerika Serikat, hal ini yang kemudian menjadi pendorong bagi Rusia, China dan negara-negara di kawasan Asia Tengah dalam membentuk suatu pengaturan politik dan keamanan bersama sebagai bentuk perlawanan dalam melawan dominasi Amerika Serikat tersebut.

b) Isu-isu yang sedang berkembang

Dalam indikator yang terakhir ini, terkait mengenai isu-isu yang berkembang, dalam artian apakah di era globalisasi saat ini sedang berkembang isu-isu yang mengharuskan kerja sama negara-negara yang ada di suatu kawasan, terutama dalam hal pengaturan keamanan dan keamanan atau tidak. Sama halnya ketika isu terorisme menjadi isu yang sedang mencuat, dan pada akhirnya menuntut negara-negara yang ada dalam suatu kawasan untuk membuat security arrangement (kesepakatan keamanan). Akan tetapi, disisi lain justru isu yang sedang berkembang bisa saja tidak berpengaruh terhadap pembentukan pengaturan keamanan antar negara yang ada dalam suatu kawasan.

Dari penjelasan diatas, kita bisa melihat bahwa variable-variabel (internal maupun eksternal) yang ada dalam *Regional Security Complex* ini sangat relevan dengan keadaan Jepang dalam mengeluarkan kebijakan *Proactive Contribution to Peace* untuk

mengamankan kawasan regional Laut China Selatan, dimana variable-variable yang ada ternyata saling berkaitan satu sama lain. Hal ini bisa kita lihat dari letak geografis Jepang yang bersentuhan langsung dengan kawasan Laut China Selatan, kedekatan Jepang dengan negara-negara SEA, adanya kesamaan persepsi yang relevan dalam hal ekonomi, social, dan politik antara Jepang dan beberapa negara yang ada di SEA, serta bagaimana respon Jepang terhadap isu-isu yang berkembang di kawasan Laut China Selatan seperti, sengketa serta ekspansi.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan membahas keputusan Jepang dalam mengamankan laut Cina selatan, untuk itu, dalam menulis penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis dampak kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang terhadap keamanan regional laut Cina selatan.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung seperti website pemerintah, jurnal, dan buku. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan dari beberapa sumber, seperti artikel dan kumpulan berita di internet dan dokumen-dokumen lain yang dapat membantu

penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis kiranya menggunakan teknik pengumpulan data telaah pustaka atau library research, dimana penulis akan melihat dan mengkaji beberapa sumber atau literatur yang ada, baik itu buku, jurnal, artikel, dokumen, makalah serta beberapa sumber lain seperti surat kabar yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data, peneliti menggunakan Teknik analisis kualitatif, dimana pada penelitian ini akan menekankan analisis serta pengamatan terhadap fenomena-fenomena, substansi dan bagaimana arti dalam fenomena tersebut agar nantinya dapat menjelaskan bagaimana hasil atau output dalam penelitian ini

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, kiranya peneliti menggunakan metode penulisan secara deduktif. Dimana akan menjelaskan hal hal umum, mengenai kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang serta pengimplementasiannya lalu kemudian akan membahas hal hal mengenai dampak dari kebijakan tersebut terhadap kawasan regional laut cina selatan. Selain itu, penulis juga akan mengelaborasi keterkaitan keseluruhan permasalahan melalui kerangka konsep.

F. Sistematika Penulisan

Berikut adalah uraian sistematika penulisan penelitian yang terbagi ke dalam limabab, yakni:

BAB 1 Pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka akan mengulas lebih jauh lagi mengenai konsep- konsep maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari ulasan tersebut ialah untuk menemukan variable yang akan memengaruhi kajian yang akan diteliti.

BAB 3 Gambaran Umum mengenai *National Security Strategy*, *National Defense Programe Guidelines*, kebijakan *Proactive Contribution to Peace* Jepang serta gambaran mengenai keamanan regional Laut Cihna Selatan.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian pada bab ini merupakan operasionalisasi variabel yang dikemukakan di bab 1 akan diimplementasikan terhadap data-data guna menemukan jawaban dan justifikasi atas pertanyaan penelitian yang diangkat.

BAB 5 Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan serta mamvalidasi Kembali asumsi dan hipotesis yang telah diproyeksikan di awal penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *National Security Policy*. Relevansi antara rumusan masalah dengan *National Security Policy* bisa kita lihat dari kebijakan keamanan yang dikeluarkan oleh Jepang, yakni “*Proactive Contribution to Peace*”, dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari kebijakan keamanan ini adalah mengamankan dan memperkuat keamanan nasional negara Jepang serta berpartisipasi dengan aktif dalam dunia internasional. Tujuan dari kebijakan ini yang kemudian dijadikan sebagai dasar oleh penulis untuk menggunakan konsep yang memiliki keterkaitan dengan *National Security Policy*.

Tidak hanya keterkaitan konsep keamanan nasional saja yang membuat penulis memilih teori ini, tetapi *Regional Security Complex* dianggap penulis mampu digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu terkait alasan Jepang mengeluarkan kebijakan *Proactive Contribution to Peace* di akhir tahun 2013. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana kompleksitas serta keadaan yang terjadi didalam suatu kawasan regional dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara, karena penelitian ini akan berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh Jepang, tidak hanya dalam mengeluarkan kebijakannya tetapi juga meliputi hal-hal seperti interaksinya dengan negara-negara yang ada di *South East Asia* (SEA) serta bagaimana pengaruh interaksi antara China

dan Jepang di kawasan regional Laut China Selatan. Oleh karena itulah *Regional Security Complex* dianggap sesuai oleh penulis dengan fokus penelitian ini.

A. *National Security Policy*

Setelah Perang Dunia II berakhir, ruang lingkup dalam konsep keamanan nasional (*national security*) seperti yang dikutip oleh Komisi Konstitusi (2004) dari Christopher Schoemaker hanya mencakup “the protection from external invasion, an attitude primarily driven by the war”. Persepsi yang sama juga ditekankan dalam berbagai literatur lainnya, mulai dari pengertian umum dalam kamus (Peter Salim, 2002) sampai pengertian-pengertian khusus yang diberikan oleh pengamat (Edy Prasetyono, 2005; Kusnanto Anggoro, 2004). Pada akhirnya pengertian-pengertian dalam konsep keamanan menekankan pada pemahaman yang khusus dalam arti obyeknya, sehingga keamanan nasional tidak mencakup seluruh aspek keamanan dalam suatu negara tetapi difokuskan pada ancaman terhadap negara dan tujuan vital nasional.

Menurut Christopher S. yang mengemukakan bahwa keamanan nasional atau “national security” dalam konteks Amerika Serikat (AS) mengandung pengertian: “the protection of the United States from major threats to our territorial, political, or economic well-being”. Seperti juga dikonfirmasi oleh Tim National Security Council Amerika Serikat bahwa negara (*state*) AS menggunakan istilah “national” untuk pengertian negara federasi (USA), bukan “state” yang berarti negara bagian. Bahkan bagi AS

“national security” adalah keamanan kawasan dunia yang mengancam negara AS, sementara untuk keamanan dalam negeri mereka mengembangkan “home land security”. Dalam melihat dan memahami keamanan sebagai suatu konsep, khususnya keamanan nasional tidak selalu berarti keamanan secara nasional, akan tetapi keamanan nasional memiliki arti keamanan suatu negara sebagai satu kesatuan atau entitas, dan bukan totality dalam keseluruhan masalah keamanan, yaitu keamanan negara serta keamanan kehidupan dalam suatu negara.

Secara umum, keduanya sama-sama berkuat mendebatkan wilayah cakupan keamanan (referent object of security) (Buzan, 1991). Dalam pendekatan tradisional, keamanan secara sederhana diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri (Mutimer, 1999). Dalam penerapannya, negara atau state yang menjadi subjek dan objek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional merupakan fenomena tentang negara. Dalam pemahaman tradisional ini, negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara (Prasetyono, 2006).

Kemudian, jika melihat keterkaitannya dengan sistem demokrasi, maka sistem keamanan nasional harus diformulasikan pada profesionalisme, efektif, dan akuntabel mulai dari konsep sampai kepada operasionalisasinya. Dalam memaksimalkan peran dan fungsi lembaga

keamanan nasional juga akan menjamin tegaknya kedaulatan, integritas wilayah, dan perlindungan terhadap wagra, disamping juga kondisi keamanan dalam negeri dan penegakkan hukum yang makin mantap. Meskipun pada kenyataannya, aspek-aspek ekonomi dan kesejahteraan yang mendukung system keamanan nasional masih terbatas, tetapi kemajuan suatu bangsa, termasuk dalam konteks keamanan nasional adalah tentang pentingnya perubahan cara berpikir. Merombak cara berpikir adalah suatu tantangan besar dalam suatu reformasi atau momentum perubahan. Maka dari itu, struktur baru dalam keamanan nasional perlu didahului dengan mereformasi mind-setting (cara berpikir).

Dengan demikian, sistem keamanan sebagai konsep keamanan nasional tidak hanya ditentukan oleh dinamika dan ancaman eksternal dan pengaruh arus globalisasi atau ideologi lainnya, seperti sekarang ini di mana jenis ancaman sudah dapat dilihat dalam berbagai aspek, tetapi bagaimanapun system nilai kebangsaan, identitas diri, nasionalisme dan falsafah bangsa tetap menjadi aspek yang utama. Oleh karena itu, kita harus optimis bahwa dengan ideologi bangsa dan mindset bangsa maka akan mendorong lahirnya transformasi pemikiran dan gagasan baru yang menjawab kebutuhan akan sistem keamanan nasional yang baru.

B. Regional Security Complex

Keamanan sebagai konsep Regional Security Complex dapat diartikan sebagai teori yang berfokus untuk menekankan signifikansi unsur regional atau kawasan dalam memahami dinamika keamanan

internasional, yaitu melalui pembentukan Regional Security Complexes. Pemahaman mengenai konsep security complex ini yang kemudian didefinisikan oleh Buzan sebagai sekumpulan negara yang satu dan yang lain memiliki kedekatan sehingga melahirkan primary security negara-negara tersebut bergabung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Buzan, 1991). Dalam melihat dan memahami definisi region atau kawasan dalam Teori Regional Security Complex lebih dilihat dari sisi keamanan sehingga suatu wilayah dapat didefinisikan berdasarkan jangkauan pengaruhnya terhadap sebuah isu keamanan (Morgan, 1997).

Pada penerapannya, region dalam konsep security complex ini bukanlah mengacu pada sebuah pengertian region secara teritori saja, akan tetapi lebih ke arah sekumpulan unit yang memiliki proses sekuritisasi, desekuritisasi, atau bahkan keduanya sekaligus, yang melahirkan interaksi antara satu dan yang lain. Dan kemudian menyebabkan masalah keamanan negara-negara tersebut tidak dapat dianalisa secara terpisah satu sama lain.

Aspek-aspek utama mengenai Regional Security Complex (RSC) ini meliputi unsur-unsur seperti geografi, etnisitas, dan budaya masyarakat di suatu wilayah. Berdasarkan ketiga faktor ini nantinya akan dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sistem politik, yang pada akhirnya akan melahirkan adanya saling ketergantungan antar negara satu dengan negara lain. Kemudian hal tersebut akan memberikan impact pada munculnya sistem pertahanan keamanan regional. Menurut Barry Buzan, aspek yang terpenting dalam pembentukan RSC ini adalah adanya saling

interdependensi dan interaksi dalam kerja sama keamanan antar negara-negara di dalam kawasan tersebut (Buzan, 1990).

RSC sendiri mengacu kepada istilah yang digunakan oleh Barry Buzan dan Ole Weaver untuk menggambarkan kondisi keamanan di dalam suatu kawasan. Kondisi keamanan tidak bisa berdiri sendiri, artinya keamanan yang ada di suatu kawasan merupakan akumulasi dari hasil interpretasi atas kebijakan keamanan nasional suatu negara terhadap negara lain, dan demikian seterusnya. Permasalahan muncul Ketika hubungan antar negara yang ada dalam satu kawasan tidak berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi di kawasan regional Laut China Selatan. Rangkaian konflik yang terjadi antara Jepang dan China menyebabkan interpretasi Jepang atas kebijakan keamanan China yang terus-menerus melakukan aksi provokasi terhadap Jepang tidak berlangsung dengan baik, dan cenderung saling mencurigai.

Keamanan kawasan juga bisa diartikan sebagai salah satu fokus keamanan yang mengedepan paska perang dingin. Berakhirnya perubahan dinamika dalam politik internasional telah mengalihkan fokus keamanan global menjadi keamanan-keamanan kawasan. Kompleksitas keamanan di kawasan-kawasan secara global ini telah memberikan alternatif dalam melakukan pendekatan keamanan tradisional menjadi pendekatan kawasan. Dalam menganalisis pendekatan keamanan regional (kawasan) dengan melihat kompleksitasnya yang dikemukakan oleh ahli keamanan yakni, Barry Buzan dan Ole Waever melalui Regional Security Complex

Theory. Lalu kemudian, dalam melihat dan menganalisis Regional Security Complex Theory, kawasan didefinisikan sebagai :

“a distinct and significant subsystem of security relations exist[ing] among a set of states whose fate is that they have been locked into geographical proximity with each other” (Buzan and Weaver, 2003).”

Regional Security Complex Theory merupakan sebuah teori yang memadukan pendekatan neorealis dan konstruktivis dalam melihat kompleksitas keamanan yang ada di suatu kawasan. Pendekatan neorealis digunakan untuk melihat peran power distribution dan faktor geografis dalam kawasan yang dimaksud. Sementara dalam menganalisis melalui pendekatan konstruktivis digunakan dalam mengidentifikasi pola allies dan enemy yang membentuk kompleksitas keamanan yang ada di dalam suatu kawasan. Jika dilihat secara menyeluruh, Regional Security Complex memiliki beberapa variabel-variabel seperti boundary dalam Regional Security Complex, social construction dan pola amity dan enmity negara-negara di dalam kawasan, anarchic structure ataupun struktur anarki yang ada didalam sistem kawasan, serta polaritas atau power distribution di dalam kawasan (Buzan and Weaver, 2003).

C. Definisi Konseptual

1. *Boundary*

Dalam memahami Regional Security Complex Theory, rasa *unsecurity* (tidak aman) diciptakan oleh ancaman yang datangnya dari negara yang berdekatan, bukan dari negara yang jaraknya jauh. Maka dari itu, dalam skala global dipahami memiliki beberapa kompleksitas keamanan regional, yang menjadi subsistem dari keamanan global. Jika dipahami melalui Regional Security complex, kawasan juga memiliki subkompleksitas-subkompleksitas yang membentuk kompleksitas keamanan kawasan juga.

Dalam kasus Laut China Selatan, maka kawasan perairan ini merupakan memiliki subkompleksitas yang membentuk kompleksitas keamanan kawasan baik bagi kawasan Asia Timur dimana China dan Taiwan merupakan bagian di dalamnya maupun bagi kawasan Asia Tenggara yang menjadi letak 3 claimant states lain dalam konflik Laut China Selatan. Maka yang dimaksud boundary dalam kasus ini adalah kawasan Laut China Selatan dan negara-negara claimant states. Dalam konteks kasus ini maka peringkat analisis yang digunakan adalah inter-region atau antar kawasan yang memberi karakteristik tipe Regional Security Complex yang Supercomplexes. (Buzan and Weaver, 2003) membagi tipe kompleksitas keamanan (security complex) sebagai berikut :

Type	Key features	Example(s)
Standard	Polarity determined by regional powers	Middle East, South America, Southeast Asia, Horn, Southern Africa
Centred		
Superpower	Unipolar centred on a superpower	North America
Great power	Unipolar centred on a great power	CIS, potentially South Asia
[Regional power]	Unipolar centred on a regional power	none
Institutional	Region acquires actor quality through institutions	EU
Great power	Bi- or multipolar with great powers as the regional poles	Pre-1945 Europe, East Asia
Supercomplexes	Strong interregional level of security dynamics arising from great power spillover into adjacent regions	East and South Asia

Sumber : Barry Buzan, dan Ole Wæver, *Regions and Powers: The Structure of International Security*

Dilihat dari fitur kuncinya, konflik tipe Supercomplexes memiliki karakter dinamika keamanan yang kuat antar kawasan, yaitu kawasan Asia Tinur dan Asia Tenggara. Asia Timur diwakili oleh China dan Taiwan dan Asia Tenggara yang diwakili oleh Malaysia, Vietnam, dan Filipina, kelimanya adalah claimant states atau negara yang melakukan klaim atas wilayah Laut China Selatan. Dinamika keamanan antar kawasan yang terjadi diakibatkan oleh spillover great power ke dalam kawasan lain yang berdekatan. China pasca perang dingin tumbuh menjadi negara great power.

Negara great powers oleh Buzan dikarakteristikan sebagai negara yang tidak harus memiliki kapasitas besar dalam semua sektor dan tidak harus selalu aktif dalam proses sekuritisasi dan desekuritisasi dalam semua area di sistem internasional. Negara seperti ini cenderung melihat dirinya lebih dari sekedar kekuatan regional atau regional powers. Status great

power kuncinya terletak pada perbedaan respon yang diberikan oleh pihak lain terhadapnya dibandingkan terhadap negara lain di kawasan berdasarkan kalkulasi level sistem tentang distribusi power pada saat itu dan di masa depan. Negara great powers cenderung melihat dirinya lebih dari sekedar kekuatan regional atau regional powers dan memiliki prospek sebagai super powers serta mampu beroperasi di lebih dari satu kawasan (Buzan and Weaver, 2003).

Karakteristik-karakteristik diatas dimiliki oleh China. Secara militer China memang belum menempati posisi sebagai negara dengan kapabilitas militer first-class yang menjadi karakteristik negara super powers. Amerika Serikat masih menempati posisi teratas sebagai negara yang memiliki kekuatan militer terbesar sampai saat ini berdasarkan 40 indikator yang digunakan oleh Global Fire Power, sebuah lembaga penyedia data kekuatan militer dunia (Lingga Pos, 2013). Namun demikian pada tahun 2013, China menaikkan belanjanya sebesar 10,7 persen sehingga mencapai 710,2 miliar Yuan atau setara dengan US\$ 115,7 miliar, angka yang cukup besar dan mengancam bagi negara-negara yang sedang berseteru dengannya (Gerin, 2013).

Dengan pengembangan kapabilitas yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, China senantiasa dipandang sebagai ancaman oleh Amerika Serikat sebagai negara super power. Kompetisi Sino-US terkait dengan peningkatan kapabilitas militernya dan agresifitasnya di wilayah kawasan Asia bahkan dikhawatirkan oleh beberapa ahli akan menuntun

pada Perang Dingin baru antara Amerika Serikat dan China (Williams, 2008).

2. *Structure Anarchy*

Kontestasi atau konflik di Laut China Selatan tidak lebih dan tidak kurang diperengaruhi oleh perubahan keamanan regional yang muncul paska Perang Dingin. Klaim wilayah yang dilakukan China sebetulnya telah berlangsung bahkan selama Perang Dingin. Namun selama Perang Dingin, upaya klaim China atas wilayah-wilayah di perairan ini terbatas oleh situasi pada saat itu. China mampu melakukan konsolidasi terkait klaimnya atas kepulauan Paracel dengan Vietnam pada 1974 melalui upaya pemulihan hubungannya dengan Amerika Serikat pada saat itu. Pada tahun 1980an China juga tidak bisa mengacuhkan dampak klaimnya atas sebagian dari kepulauan Spratly yang menjadi bagian wilayah Vietnam karena pespektif strategisnya terhadap Uni Soviet pada saat itu (Leifer, 2012).

Paska Perang Dingin misalnya, penarikan basis militer Amerika Serikat di Filipina, China menetapkan jangkauan peraiannya sampai ke salah satu wilayah Spratly yaitu Mischeif Reef yang berjarak 130 mil dari Palawan yang menjadi wilayah Filipina (Leifer, 2012). Hilangnya rivalitas Amerika Serikat dan Uni Soviet paska Perang Dingin menyebabkan struktur kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara menjadi anarki bersamaan dengan ketiadaan proyeksi kekuatan kedua negara adidaya itu di kawasan ini yang sebelumnya membatasi agresivitas China dalam

mengklaim wilayah di Laut China Selatan.

3. *Social Construction*

Variabel Social Construction menjelaskan pola amity (kawan) dan enmity (lawan) di kawasan, bagaimana pola ini terbentuk, bagaimana pola ini bertahan, dan apakah bisa pola ini diubah. Melalui variabel ini dilihat bagaimana dinamika balance of power menciptakan security dilemma, mutual distrust dan sebagainya yang mendorong pola enmity dan amity (San, 1993).

Pola amity dan enmity adalah latar belakang sejarah dan sosial. Pola amity dan enmity bisa berbentuk chaos (dimana hampir semua hubungan jenisnya adalah enmity), formasi konflik regional (didominasi oleh hubungan yang konfliktual namun amity masih dimungkinkan), security regime (didominasi hubungan kerja sama tapi enmity masih tetap ada), dan security communities (hampir semua hubungan merupakan hubungan amity). Pola hubungan seperti ini sifatnya bertahan lama, dan walaupun dimungkinkan bisa berubah akan sangat perlahan dan tidak mudah (San, 1993).

Dalam konteks Laut China Selatan pola amity dan enmity yang terjadi bentuknya chaos, hampir semua hubungan jenisnya enmity. China yang agresive untuk memperluas wilayahnya membentuk hubungan enmity yang kuat dengan Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Hubungan China dan Taiwan yang memang memiliki sejarah hubungan selat yang panjang melalui sejarah panjang kolonialisme atas Taiwan.

China sejak 1949 mengklaim Taiwan sendiri sebagai salah satu propinsinya, namun klaim ini ditolak keras oleh Taiwan. Konflik China dan Taiwan di Laut China Selatan berkembang sampai pada klaim wilayah. Taiwan mengklaim Spratly khususnya Pulau Pratas sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara itu Spratly sendiri merupakan gugusan kepulauan yang diklaim pula oleh ketiga negara lainnya. Secara umum konflik Laut China Selatan muncul karena klaim China atas keseluruhan Laut China Selatan yang menurut China berdasarkan sejarahnya merupakan bagian wilayahnya.

Catatan sejarah, penemuan situs, dan dokumen-dokumen menunjukkan penggunaan gugusan pulau-pulau di Laut China Selatan tersebut menjadi wilayah yang digunakan oleh nelayan China. Klaim ini mendapatkan penolakan dari negara-negara yang lain. Claimant States yang lain juga memiliki klaim yang sama atas gugusan pulau ini berdasarkan catatannya masing-masing. Meskipun wilayah yang diperebutkan di Laut China Selatan ada beberapa, namun Spratly dan Paracel adalah yang paling konflik dilihat dari intensitas konfliknya.

Klaim Vietnam didasarkan pada latar belakang sejarah ketika Vietnam masih menjadi jajahan Perancis pada tahun 1930an, dimana pada saat itu Spratly dan Paracel berada di bawah kontrolnya. Oleh karena itu setelah merdeka, Vietnam mengklaim kedua pulau tersebut dengan menggunakan argumen dasar landasan kontinen (Karmina, 2012). Filipina mengklaim Spratly berdasarkan prinsip landas kontinen dan catatan

sejarah eksplorasi Spratly oleh penjelajah Filipina pada tahun 1956. Filipina secara resmi mengklaim 8 pulau di Spratly sebagai bagian dari propinsi Palawan. Klaim Malaysia berdasarkan atas sebagian wilayah di Spratly berdasarkan prinsip landas kontinen atas 3 pulau yang diklaimnya (Karmina, 2012).

Pola konflik ini berlangsung panjang karena China terus menerus memperluas wilayah yang diklaimnya. Pada perkembangan terakhir masing- masing claimant states mengukuhkan klaim mereka dengan mendirikan pos terdepan baru oleh masing-masing negara, yaitu di : Pulau Karang Barat Daya dan Kepulauan Spratly oleh Vietnam, Terumbu Karang Mariveles dan Bantaran Ardasier oleh Malaysia, Pulau Thitu oleh Filipina, Itu Ada oleh Taiwan dan China sendiri di Terumbu Karang Fiery Cross (Sieff, 2013).

4. *Power Distribution*

Power Distribution dalam Regional Security Complex berbasis pada logic of anarchy (yang membuat negara-negara harus berhadapan dengan security competition) dan dampak dari kedekatan geografis (Sieff, 2013). Power distribution kemudian terletak pada mekanisme penetrasi. Penetrasi terjadi ketika kekuatan luar melakukan aliansi keamanan dengan negara-negara dalam Regional Security Complex (Sieff, 2013). Ambisi China di wilayah Laut China Selatan pada perkembangannya mendorong masuknya kembali kekuatan lain di luar kawasan baik sebagai upaya perimbangan kekuatan China di Laut China Selatan, maupun sebagai